Urgensi APBN untuk LSM

Mickael Hoelman

2/16/2022

Agenda

Perkenalan singkat

Latar belakang

Hypothesis

Tantangan Menggugah

Urgensi Dana APBN

Memajukan Indonesia

Syarat-syarat perlu

Pesan-pesan kunci

Periode Transisi

Pilar Pembentukan Dana APBN untuk LSM

Perkenalan

Mickael Hoelman adalah Penasihat Senior INFID (International NGO Forum on Indonesian Development). Hoelman menamatkan sarjana di bidang ilmu ekonomi dan studi lanjutan pada disiplin ilmu politik. Selain menjadi penasihat, ia juga kerap melakukan riset dan kajian terkait politik ekonomi, kebijakan pembangunan sosial hingga peranan aktor-aktor masyarakat sipil.

Ia juga merupakan penulis utama dokumen Background Paper Pembentukan Dana LSM di Indonesia, Pokja Pendanaan LSM, 2021



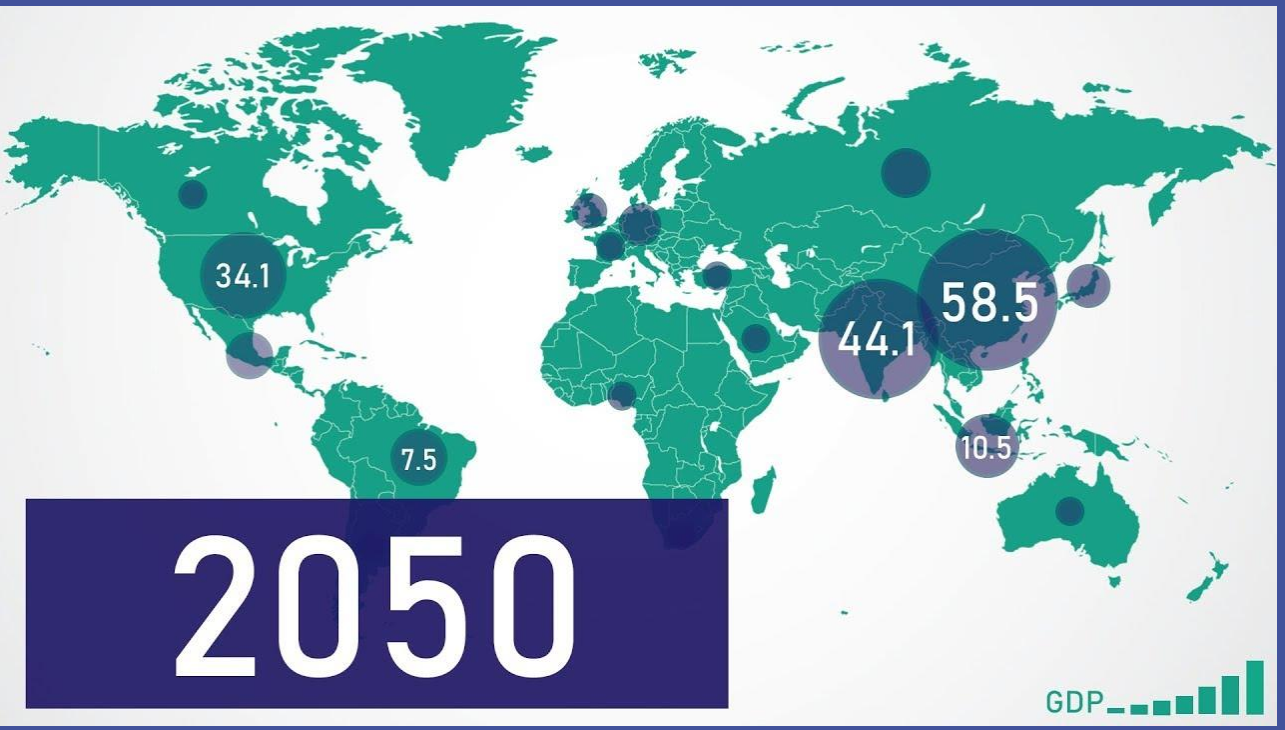


Latar belakang

Keberadaan LSM penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi, terutama dengan mentransformasikan aspirasi dan tuntutan kolektif warga melalui artikulasi kerangka representasi demokrasi yang lebih terlembaga.

Peran LSM setara dengan partai politik, serikat pekerja hingga organisasi bisnis.

Mereka kini juga tengah sama-sama dihantam oleh badai pandemi.



Hypothesis

Indonesia telah menjadi kekuatan ekonomi baru.

Indonesia merupakan satu–satunya negara anggota Kelompok 20 di Asia Tenggara.

Indonesia tumbuh dengan kapasitas menyediakan lebih banyak pembiayaan pembangunan dan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050 (PwC, 2017).

Semua itu ciri-ciri negara menengah-maju

Tantangan Menggugah

1

Sejalan dengan kemajuan ekonomi Indonesia, bantuan mitra pembangunan atau donor internasional terus menurun dan tidak lagi menempatkan Indonesia sebagai negara prioritas

2

Kebijakan yang mendukung ekosistem pendanaan bagi LSM Indonesia di dalam negeri masih belum tersedia hingga hari ini baik secara nasional maupun daerah

3

Sementara, Pemerintah telah membentuk Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI atau IndonesianAID) pada 2019 untuk menyalurkan hibah bantuan pembangunan kepada berbagai negara dan LSM Asing.

Urgensi Dana APBN









"sepertiga dari LSM Indonesia mengalami kekurangan pendanaan operasional mereka."

Kelompok Kerja LSM untuk Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia, 2021

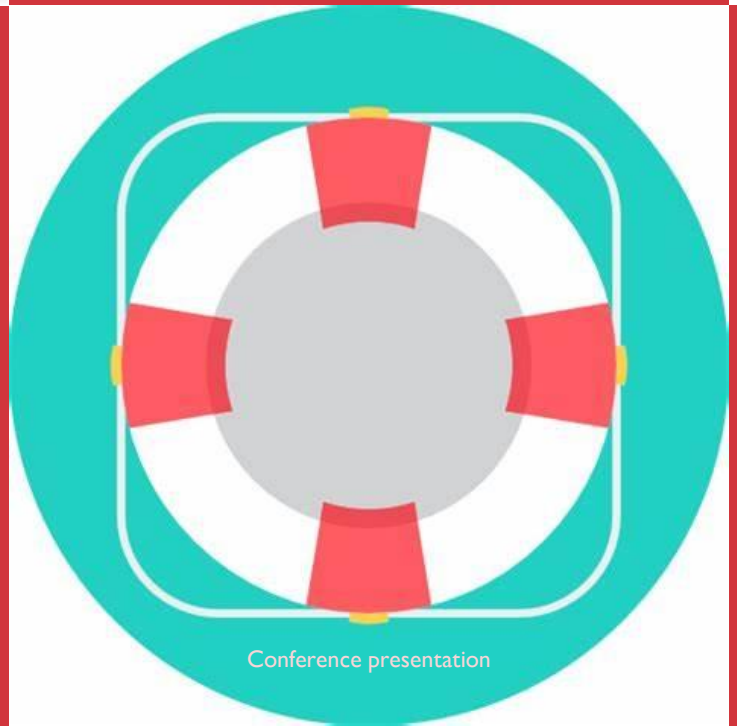
Memajukan Indonesia



Mempercepat pemulihan warga paska–pandemi



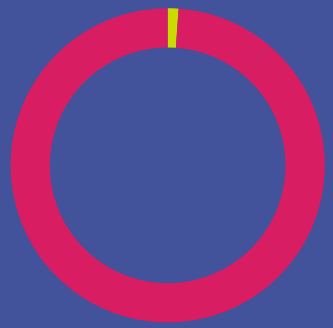
Mengarahkan kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas LSM



Mewujudkan Nawacita, RPJMN 2020–2024, RPJPN 2005–2025, dan Visi Indonesia Emas 2045

Mewujudkan komitmen Indonesia sebagai negara menengah dalam berbagai forum global seperti OECD, PBB dan G20

Syarat perlu (perspektif donor)



1

Pooling Fund



2

Blended Finance



3

Core Support



4

Immune to Corruption

Syarat perlu (perspektif penerima)



1

Kolaborasi Multisektor



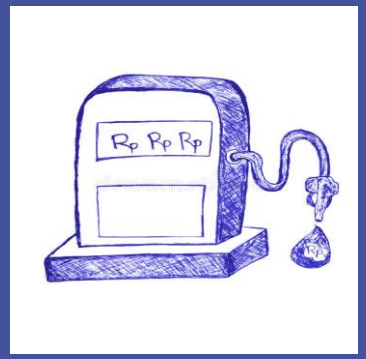
2

Antisipatif



3

Memiliki Sarana Investasi



4

Likuid



5

Berbagi Risiko

Pesan-pesan Kunci

Menjaga akar rumput

Menjaga demokrasi

Merawat politik kewargaan

Membangun kerja sama



Dana Abadi	APBN	Demokrasi
Dana abadi (*endowment fund*) **kombinasi** *pooling fund* dari hibah bantuan pembangunan yang berkomitmen menjaga pemajuan demokrasi dan ketahanan masyarakat sipil di Indonesia	**Penyertaan alokasi Dana Abadi untuk Ketahanan Masyarakat Sipil** | **LSM** dialokasikan secara bertahap –dan dapat mengelola hibah atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang–undangan	**Ditujukan untuk membantu pendanaan LSM** yang bergerak di bidang–bidang pemajuan hak–hak warga, termasuk untuk sektor demokrasi dan tata pemerintahan

Periode Transisi

	Tahap I	Tahap II	Jangka Panjang
Fokus pendanaan	• Fleksibel dan antisipatif	• Mengurangi keterikatan, meningkatkan keleluasaan, inklusif, kolaboratif, dana pemerintah dan publik	• Perluasan, alternatif, pemupukan dan investasi
Mekanisme pendanaan	• Dana Gabungan (*pooling fund*) Multi–donor untuk Ketahanan LSM	• Dana Amanah disertai Dana Abadi APBN, dan Donasi Publik	• Dana Abadi APBN dan Donasi Publik serta Obligasi Sosial
Aturan kebijakan	• N/A atau • Peraturan Menteri	• Peraturan Presiden atau • Peraturan Menteri	• Peraturan Menteri • Peraturan OJK
Ketersediaan dana	• *Refocusing* dana mitra pembangunan yang tidak terserap karena pandemi (10–15 persen) • Dana gabungan dari mitra pembangunan dan filantropi internasional yang memiliki komitmen	• Penyertaan dana abadi dari mitra–mitra pembangunan yang memiliki komitmen • Donasi publik dan filantropi	• Alokasi penyertaan dana awal dana abadi dalam APBN selama 3 tahun minimal Rp 6 Triliun dimulai 2023 • Uji coba *revenue tagging* pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) • Peluncuran obligasi sosial dengan nilai imbal hasil awal setidaknya setara nilai awal sukuk negara tabungan (ST)
Model kerja sama	• *Dedicated* • Dikelola secara kolaboratif oleh konsorsium LSM Indonesia; atau melalui perantara kementerian/ lembaga yang memiliki komitmen, tugas, fungsi dan wewenang dalam memobilisasi sumber daya bagi LSM di Indonesia	• *Call for Proposal* • Dikelola oleh BLU sebagai pengelola dana. Seleksi dilakukan secara terbuka, inklusif dan akuntabel (bukan bersifat bantuan sosial atau hanya ditujukan bagi pembiayaan operasional LSM)	• *Call for Proposal* • Dikelola oleh BLU sebagai pengelola dana. Seleksi dilakukan secara terbuka, inklusif dan akuntabel (bukan bersifat bantuan sosial atau hanya ditujukan bagi pembiayaan operasional LSM)
Akuntabilitas	• Pelaporan dilaksanakan oleh penerima dan diawasi oleh konsorsium LSM atau oleh kementerian/ lembaga terkait sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya	• Pelaporan dilaksanakan oleh BLU dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur Pemerintah, perwakilan LSM, hingga sektor swasta (tripartit)	• Pelaporan dilaksanakan oleh BLU dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur Pemerintah, perwakilan LSM, hingga sektor swasta (tripartit)

Pilar Pembentukan Badan Pengelola Dana APBN untuk LSM



Bentuk kelembagaan

Badan Layanan Umum



Peraturan Presiden dapat lebih tanggap dan akomodatif dalam merespons situasi mendesak



Pemberian hibah dan penyediaan program pelatihan berdasarkan spesifikasi kebutuhan (afirmatif). Mitra swasta seperti bisnis & filantropi sangat strategis, termasuk kedepan melalui mekanisme pasar obligasi sosial



Dana abadi yang mencerminkan prioritas urgensi, kepastian keamanan pendanaan dalam jangka panjang, disertai tata kelola keterbukaan informasi sumber pendanaan, mekanisme akuntabilitas, proses kontrol dan standar pengelolaan dana

Terima kasih

Mickael Hoelman

mbhoelman@gmail.com